

PERAN SEKTOR BASIS DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

**Oktavianus Katiandagho
Gene H. M Kapantouw
Caroline B. D Pakasi**

ABSTRACT

This study aims to determine what sectors into the base sector and the role of base sectors on employment within the last 5 years in the Province of North Sulawesi study was conducted over three months starting in October 2016 until the month of December 2016 in the province of North Sulawesi. In this study, the data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of North Sulawesi Province. The data is processed using descriptive analysis and presented in tables and graphs. From the results of research show that the sector became the sector base in North Sulawesi are agriculture, forestry and fisheries, construction, and transport and communications sectors. In the agricultural sector the rate of labor absorption is much larger than the other two sectors of the base, but the growth rate of its workforce decreased when compared with other bases of both sectors. It can be seen from the average level of labor absorption per each sector of a base. At the rate of growth of gross regional domestic product (GRDP) of North Sulawesi province to the agricultural sector amounted to 21.70 percent and the rate of employment growth of 0.22 percent, the construction sector amounted to 12.71 per cent with employment growth rate of 0.44 percent, while transport and communication sector amounted to 12.59 with labor force growth rate of 2.97 percent.

Keywords: base sector, labour, absorption, North Sulawesi Province

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis dan peranan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Provinsi Sulawesi Utara Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan mulai pada bulan Oktober 2016 hingga bulan Desember 2016 di Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Data tersebut diolah menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Dari hasil penelitian menunjukkan sektor yang menjadi sektor basis di Sulawesi Utara adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor konstruksi, dan sektor transportasi dan komunikasi. Pada sektor pertanian yang tingkat penyerapannya jauh lebih besar dari kedua sektor basis lainnya, akan tetapi tingkat pertumbuhan tenaga kerjanya menurun jika dibandingkan dengan kedua sektor basis lainnya. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata tingkat penyerapan pertahun tiap-tiap sektor basis. Pada laju pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara untuk sektor pertanian sebesar 21,70 persen dan tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebesar 0,22 persen, sektor konstruksi sebesar 12,71 persen dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja 0,44 persen, sedangkan sektor transportasi dan komunikasi sebesar 12,59 dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja sebesar 2,97 persen.

Kata Kunci: Sektor Basis, tenaga kerja, penyerapan, Provinsi Sulawesi Utara

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan fenomena penting yang dialami oleh perekonomian seluruh dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu tolak ukur adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan sektor ekonomi merupakan proses untuk mengubah keadaan supaya lebih baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja dan kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2006).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, maka suatu daerah harus mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis di daerah tersebut. Secara teoritis, meningkatnya sektor basis daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan asumsi terjadi peningkatan investasi.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri.

Kecenderungan wilayah yang berkembang dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan pembangunan di sektor industri, pertanian, perdagangan dan jasa, karena dianggap lebih mampu meningkatkan perekonomian dan menumbuhkan berbagai kegiatan yang saling berkaitan sehingga mampu berfungsi sebagai pendorong pembangunan.

Prasarana yang paling tepat dalam perencanaan pembangunan ini adalah penentuan sektor basis dimana secara teknis, sektor basis ini akan mampu dijadikan pemicu bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB. Pada kondisi berikutnya secara teoritis, sektor basis akan mendorong sektor-sektor ekonomi yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga manfaat eksternalitas dari perencanaan pembangunan ekonomi daerah juga dapat terwujud.

Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak kemajuan dalam segi perekonomian yang dicerminkan dalam angka Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja. (Arsyad, 2004).

Provinsi Sulawesi utara berada pada posisi strategis karena terletak di Pasifik Rim yang secara langsung berhadapan dengan negara-negara Asia Timur dan negara-negara Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke Pasifik dan memiliki potensi untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Provinsi ini juga turut mendukung peran Pulau Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan serta pertambangan nikel di tingkat nasional. Kinerja perekonomian Sulawesi Utara tahun 2011-2014 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2011-2012 laju pertumbuhan ekonomi meningkat dari 6,17 % menjadi 6,86 %, namun kembali mengalami penurunan hingga 6,31 % pada tahun 2014. Selama tahun 2011-2014 pertumbuhan rata-rata Sulawesi Utara sebesar 6,43 %, berada di atas rata-rata nasional 5,9 %. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara turut didukung oleh pemanfaatan sumberdaya alam yang melimpah di wilayah ini.

Selama kurun waktu 2010-2014 pendapatan per kapita di Provinsi Sulawesi Utara cenderung meningkat, namun masih berada di bawah pendapatan per kapita nasional. Hal ini menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk Sulawesi Utara relatif lebih rendah secara nasional. Jika pada tahun 2010 rasio PDRB perkapita Provinsi Sulawesi Utara dan PDB Nasional sebesar 78,91 %, maka pada tahun 2014 rasionya meningkat menjadi 79,61%. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada setiap sektor perekonomian suatu daerah akan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar menunjukkan bahwa sektor perekonomian tersebut mampu menjadi sektor potensial. (Dedifu, 2015)

Data BPS pada Agustus tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Sulawesi Utara mencapai 1,10 juta orang, bertambah banyak 38 ribu orang dibandingkan Agustus 2014. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan 1,29% dibandingkan keadaan Agustus 2014 menjadi 61.28%. Dengan demikian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Agustus 2015 mencapai 9.03%, mengalami kenaikan dibanding TPT Agustus 2014 sebesar 7.54%.

Besarnya angka pengangguran merupakan salah satu instrumen dalam menentukan apakah pembangunan ekonomi daerah tersebut berhasil atau tidak. Sektor basis diharapkan mampu mendorong sektor ekonomi yang lain untuk tumbuh dan mengimbangi pertumbuhan penduduk dan motivasi untuk mencari kerja.

Rumusan Masalah

Sektor-sektor yang merupakan sektor basis dapat dijadikan prasarana untuk memicu pertumbuhan sektor-sektor lainnya untuk berkembang mengingat kontribusinya yang cukup besar terhadap PDRB.

Sektor basis di daerah dituntut untuk meningkatkan kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja selain pencapaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain setiap penambahan angkatan kerja, sektor basis harus dapat menyediakan lapangan kerja guna menyerap penawaran tenaga kerja yang ada. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi terhadap dan tidak seimbang sehingga perlu diketahui seberapa besar peranan sektor basis dalam menyerap tenaga kerja seiring laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu, diajukan beberapa rumusan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas, yaitu:

1. Sektor apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2015.
2. Seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2015.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apa saja yang menjadi sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2015
2. Menganalisis penyerapan tenaga kerja pada sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2011-2015

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai sumber informasi dalam merancang kebijakan pembangunan untuk mengembangkan sektor perekonomian basis.
2. Bagi peneliti sebagai suatu analisis untuk mengetahui sektor basis dan penyerapan tenaga kerja.
3. Bagi mahasiswa atau yang memerlukan, dapat dijadikan referensi kajian dalam bidang penelitian sektor basis.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan Oktober - Desember 2016 di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Konsepsi Pengukuran Variabel

Variabel yang diukur dalam penelitian ini data BPS Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2011-2015, yaitu:

1. Jumlah Penduduk usia kerja yang berusia 15 tahun keatas (jiwa/tahun)
2. Jumlah Angkatan Kerja yang berusia 15 tahun keatas (jiwa dan % / tahun)
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Tahun 2010 (jutaan rupiah)
4. Pertumbuhan ekonomi dilihat pada penambahan jumlah barang dan jasa PDRB (% / tahun)

5. Penyerapan tenaga kerja yang berusia 15 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan utama (jiwa dan % / tahun)
6. Laju produktivitas penyerapan tenaga terhadap pertumbuhan sektor basis (% / tahun)

Analisis Data

Location Quotient (LQ)

Location Quotient (kuosien lokasi) atau disingkat LQ adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor atau industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2004).

Selain itu, analisis LQ merupakan suatu pendekatan tidak langsung yang digunakan untuk mengukur kinerja basis ekonomi suatu daerah, artinya bahwa analisis ini digunakan untuk melakukan pengujian sektor-sektor ekonomi yang termasuk dalam kategori sektor unggulan. Arsyad (2010)

Untuk menghitung rumus LQ sebagai berikut.

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt}$$

Keterangan :

LQ = Indeks Kuosien Lokasi

vi = Nilai produksi sektor i pada Provinsi Sulut

vt = Total PDRB Provinsi Sulut

Vi = Nilai produksi sektor i Nasional Indonesia

Vt =Total PDB Nasional Indonesia

Apabila nilai $LQ > 1$, maka dapat disimpulkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor basis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian. Sebaliknya apabila nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut bukan merupakan sektor basis dan kurang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Analisis Penyerapan Tenaga Kerja

Analisis penyerapan tenaga kerja dilakukan untuk mengetahui tingkat penyerapan tenaga kerja pada masing-masing sektor unggulan. Teknik analisis terdiri dari tiga tahap menurut Simanjuntak dalam Indriaty (2014), yaitu uji produktivitas tenaga kerja, laju pertumbuhan produktivitas dan elastisitas penyerapan tenaga kerja.

a. Uji produktivitas tenaga kerja

$$P = \frac{Q}{L}$$

Keterangan:

P = Produktivitas tenaga kerja

Q = PDRB Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara

L = Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara

b. Laju pertumbuhan produktivitas

$$P = \frac{(1 + g)}{(1 + n)}$$

Keterangan:

P = Laju pertumbuhan produktivitas

g = Laju pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara

n = Laju pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi, Sektor Transportasi dan Komunikasi Provinsi Sulawesi Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Provinsi Sulawesi Utara

Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan salah satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Dua provinsi lainnya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Provinsi Sulawesi Utara terletak pada $0^{\circ}\text{LU} - 3^{\circ}\text{LU}$ dan $123^{\circ}\text{BT} - 126^{\circ}\text{BT}$.

Provinsi Sulawesi Utara dengan Manado sebagai ibukotanya terletak antara $00^{\circ}15' - 05^{\circ}34'\text{LU}$ dan antara $123^{\circ}07' - 127^{\circ}10'\text{BT}$, yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Republik Philipina dan Laut Pasifik disebalah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo.

Luas Wilayah Sulawesi Utara tercatat 15.273 km^2 yang terbagi atas 11 kabupaten dan empat kota, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Manado dan Kota Tomohon. Bolaang Mongondow merupakan kabupaten dengan wilayah terluas, yaitu 3.022 km² atau 19,78% dari luas keseluruhan wilayah Sulawesi Utara.

Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan-bulan November sampai dengan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan dalam Bulan Mei sampai Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah Kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di Kabupaten Minahasa Selatan, Modayag dan Pasi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata 25⁰C. Suhu udara maksimum rata-rata 30⁰C dan suhu udara minimum rata-rata 22,1⁰C. Kelembaban udara tercatat 73,4%. Kendati demikian suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6⁰C.

Keadaan Penduduk dan Ketenagakerjaan

Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan angka proyeksi tahun 2014-2015 sebesar 1,07%, yang tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 2,06% dan yang terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,37%.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.412.118 jiwa yang terdiri dari 1.230.810 jiwa laki-laki dan 1.181.308 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 sebesar 165,85/km², kepadatan penduduk tertinggi terjadi pada Kota Manado dengan tingkat kepadatan sebesar 2550,69/km² atau sekitar 17,65%. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil 34,6/km² atau hanya berkisar 2,58%.

Sex ratio, perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 adalah sebesar 104,19% artinya diantara 100 orang wanita terdapat 104 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 109,32%, diikuti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow masing-masing sebesar 108,64% dan 108,25%, sedangkan yang terendah terjadi di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro sebesar 97,63%.

Pada Tabel 1 dapat diketahui jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara adalah 2.412.118 jiwa yang terdiri dari 1.230.810 laki-laki dan 1.110.964 jiwa perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kota Manado dengan 425.634 jiwa yang terdiri dari 213.613 jiwa laki-laki dan 212.021 jiwa perempuan. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan paling sedikit penduduknya yaitu 62.222 jiwa dengan 32.399 jiwa laki-laki dan 29.823 jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 cenderung meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2011-2015 cenderung menurun, dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada tahun 2011-2012 sebesar 1,20%, tahun 2012-2013 sebesar 1,15%, tahun 2013-2014 sebesar 1,11%, dan terendah pada tahun 2014-2015 yang berkisar 1,07%, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,13% per tahun. Selama periode 2011-2015 jumlah penduduk telah mengalami pertumbuhan sebesar 4,53% (dari 2.305.924 jiwa pada tahun 2011 menjadi 2.412.118 jiwa pada tahun 2015).

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 sebesar 1.099.272 orang, diantaranya yang bekerja sebanyak 1.000.032 orang sedangkan pengangguran sebesar 99.240 orang, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 90,97%. Dapat dilihat pada Tabel 3. Angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 paling banyak bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 319.336 orang dan paling sedikit bekerja di sektor listrik, gas dan air sebesar 3.448 orang.

Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin (ribu)			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
Kabupaten				
1. Bolaang Mongondow	121.211	111.978	233.189	108,25
2. Minahasa	168.217	160.786	329.003	104,62
3. Kepulauan Sangihe	65.498	64.086	129.584	102,2
4. Kepulauan Talaud	45.383	43.420	88.803	104,52
5. Minahasa Selatan	105.830	99.153	204.983	106,73
6. Minahasa Utara	100.719	97.365	198.084	103,44
7. Bolaang Mongondow Utara	39.102	37,229	76.331	105,03
8. Siau Tagulandang Biaro	32.397	33,185	65.582	97,63
9. Minahasa Tenggara	54.103	50.433	104.536	107,28
10. Bolaang Mongondow Selatan	32.399	29.823	62.222	108,64
11. Bolaang Mongondow Timur	35.876	32.816	68.692	109,32
Kota				
12. Manado	213.613	212.021	425.634	100,75
13. Bitung	105.094	100.581	205.675	104,49
14. Tomohon	50.576	49.797	100.373	101,56
15. Kotamobagu	60.792	58.635	119.427	103,68
Sulawesi Utara	1.230.810	1.110.964	2.412.118	104,19

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Pada Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2011	2.305.924	
2012	2.333.480	1,20
2013	2.360.388	1,15
2014	2.386.604	1,11
2015	2.412.118	1,07
Rata-rata/tahun		1,13

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016, diolah

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja			
Bekerja	691.893	308.139	1.000.032
Pengangguran	53.129	46.111	99.240
Bukan Angkatan Kerja			
Sekolah	80.179	88.286	168.465
Mengurus Rumah Tangga	22.262	405.112	427.374
Lainnya	66.244	32.350	98.594
Jumlah	913.707	879.998	1.793.705
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	92,87	86,98	90,97
Tingkat Pengangguran	7,13	13,02	9,03

Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Utara 2011-2015

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun / Jiwa				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	321.121	312.137	333.103	320.963	319.336
Pertambangan dan Penggalian	24.806	29.993	23.402	20.748	18.532
Industri Pengolahan	65.984	57.886	52.064	71.289	67.669
Listrik, Gas, dan Air	4.653	3.825	3.458	3.447	3.448
Bangunan/Konstruksi	82.431	76.026	74.315	79.244	84.546
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	196.182	189.532	190.921	195.880	207.470
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	73.065	79.698	72.451	79.114	83.400
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	22.856	24.907	31.040	29.700	26.308
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	199.622	183.288	184.703	180.371	189.323
Jumlah	990.720	957.292	965.457	980.756	1.000.032

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016; Survei Angkatan Kerja Nasional

Struktur Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan.

Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi andil pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Kontribusi suatu lapangan usaha dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase. Sehingga dilakukan perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

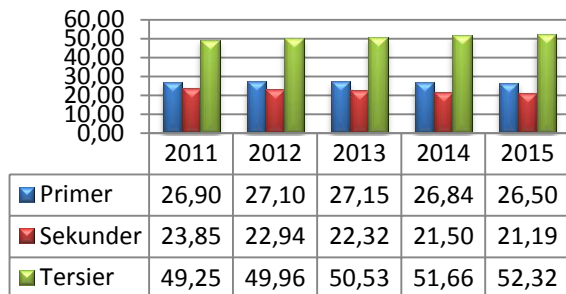
Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. SNA 2008 merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur item tertentu seperti PDRB.

Jika dilihat dominasi ada tidaknya transformasi berdasarkan dilakukannya perubahan tahun dasar PDB secara bersamaan dengan penghitungan PDRB yang tadinya 9 kategori lapangan usaha menjadi 17 kategori lapangan usaha, dikelompokkan berdasarkan jenis barang yang dihasilkan serta fungsinya, dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu:

- 1) Lapangan Usaha Primer: Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalian.

- 2) Lapangan Usaha Sekunder: Lapangan Usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori listrik, gas; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.
- 3) Lapangan Usaha Tersier: Lapangan Usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usaha tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, kategori real estat, kategori jasa perusahaan, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016

Gambar 1. Struktur Perekonomian Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2011 – 2015 (%)

Dari gambar tersebut terlihat bahwa lapangan usaha tersier paling mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2011-2015. Lapangan usaha tersier mendominasi sekitar 50% atau lebih dari separuh total nilai tambah ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Dominasi tersebut semakin meningkatnya khususnya dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, lapangan usaha primer dan lapangan usaha sekunder mengalami penurunan kontribusi khususnya selama periode 2011-2015. Lapangan usaha primer mengalami penurunan

dari 26,90% di tahun 2011 menurun hingga 26,50% di tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada lapangan usaha sekunder yang mengalami penurunan kontribusi dari 23,85% di tahun 2011 menjadi 21,19% di tahun 2015. Hal tersebut mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi Sulawesi Utara dari ekonomi yang mengandalkan lapangan usaha primer mengarah ke lapangan usaha tersier.

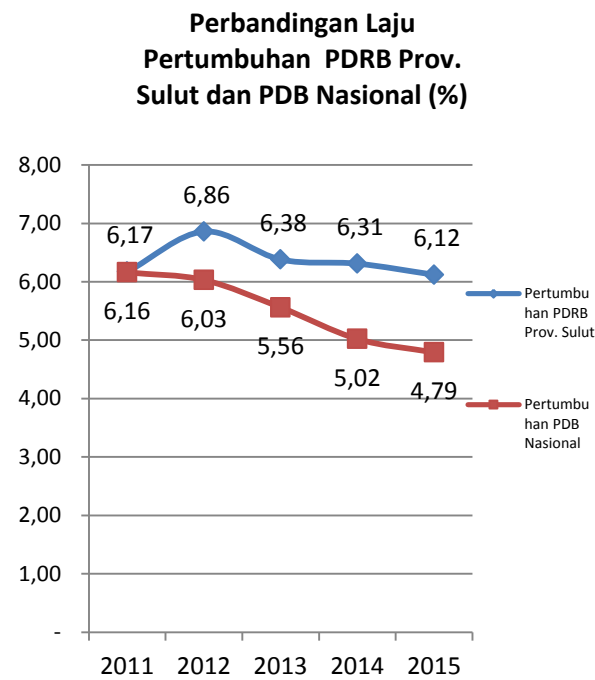
Keadaan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara

Keadaan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan tercermin dari PDRB. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah. Apabila suatu sektor ekonomi mempunyai kontribusi kecil dan pertumbuhan melambat, maka hal tersebut akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila suatu sektor ekonomi mempunyai kontribusi yang besar akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Semakin besar peranan sektoral dalam struktur ekonomi, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika suatu sektor mempunyai peran yang dominan tetapi tingkat pertumbuhannya rendah, maka akan menghambat tingkat pertumbuhan secara keseluruhan. Jika sektor tersebut mempunyai tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka otomatis akan menyebabkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLUI) 1990, sekarang telah menggunakan tahun dasar 2010 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLUI) 2009.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016

Gambar 2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2015 (%)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara atas harga konstan 2010 selama periode 2011-2015 mengalami kenaikan namun perlahan melambat. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Provinsi Sulawesi Utara periode 2011-2015 adalah tahun 2011-2012 sebesar 6,86%, tahun 2012-2013 sebesar 6,38%, tahun 2013-2014 sebesar 6,31% dan tahun 2014-2015 yaitu sebesar 6,12%. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada periode 2011-2012 mencapai 6,86%. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada periode tahun 2014-2015 yang hanya mampu bertumbuh sebesar 6,12%.

Analisa Data

Sektor Basis

Sektor basis adalah satu atau beberapa sektor yang mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan beberapa sektor lain yang terdapat dalam suatu daerah. Untuk itu dalam suatu perencanaan pembangunan ekonomi regional, suatu sektor basis harus dapat mendapat perhatian untuk dikembangkan lebih

lanjut, khususnya untuk kepentingan daerah dan untuk suksesnya pembangunan nasional pada umumnya. Untuk mengetahui kelompok sektor basis yang terdapat pada suatu daerah digunakan analisis *Location Quotient* (LQ) yaitu suatu analisa yang membandingkan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB pada lingkup nasional dalam hal ini tingkat provinsi.

Hasil LQ suatu sektor lebih dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut mempunyai keunggulan komparatif dari sektor lain, sebaliknya bila nilai LQ lebih kecil dari 1 menunjukkan bahwa sektor tersebut tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kurang potensial untuk dikembangkan. Dapat dilihat pada Tabel 5.

Apabila ditelusuri lebih lanjut berdasarkan analisis sektor basis, sektor-sektor yang dapat diperdagangkan antar daerah dengan nilai *location quotient* lebih besar dari satu ($LQ > 1$) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Konstruksi, dan Transportasi dan Komunikasi.

Kontribusi Nilai Tambah Sektor Basis Terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara

Sektor basis mendominasi perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara dalam peranannya dibanding sektor-sektor lainnya. Peran sektor basis terhadap besarnya PDRB di Provinsi Sulawesi Utara dapat dihitung dengan menggunakan rumus proporsi yaitu dengan cara membandingkan besarnya masing-masing nilai tambah dengan PDRB dikalikan 100%. Hasil penghitungan kontribusi melalui metode proporsi dapat dilihat pada Tabel 6.

Sementara itu, pada Tabel 6 perhitungan melalui metode proporsi kontribusi sektor basis terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara diperoleh hasil bahwa kontribusi sektor basis secara rata-rata terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara antara lain adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 25,27%, sektor konstruksi sebesar 12,71%, sektor transportasi dan komunikasi sebesar 9,69% pada periode 2011-2015.

Tabel 5. Perhitungan LQ Sektor Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara ADHK Tahun 2010

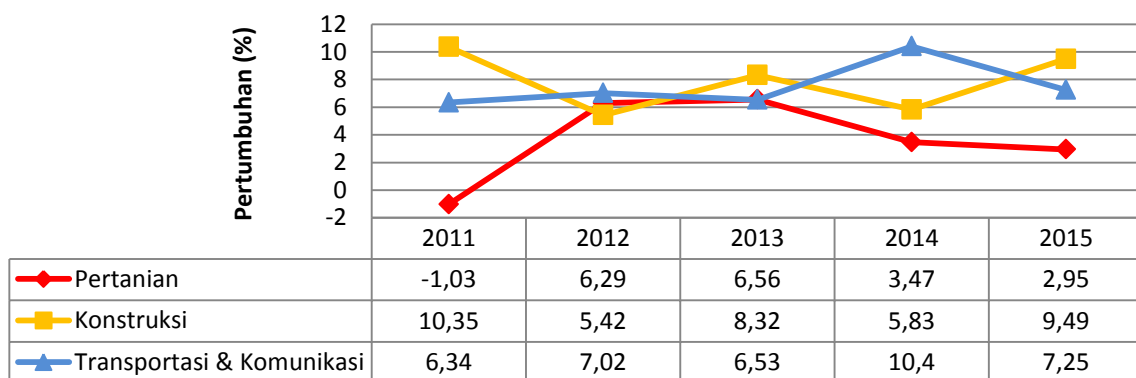
Sektor	Location Quotient (LQ)					Rata-rata	Ket
	2011	2012	2013	2014	2015		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,57	1,58	1,60	1,56	1,51	1,56	basis
Pertambangan dan Penggalian	0,47	0,48	0,49	0,51	0,57	0,50	non basis
Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Minum	0,64	0,64	0,64	0,64	0,62	0,64	non basis
Konstruksi	1,32	1,30	1,31	1,28	1,26	1,30	basis
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0,79	0,78	0,79	0,81	0,80	0,80	non basis
Transportasi dan Komunikasi	1,88	1,84	1,80	1,82	1,90	1,85	basis
Kuangan	0,89	0,89	0,88	0,88	0,85	0,88	non basis
Jasa-jasa	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	non basis

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, diolah

Tabel 6. Proporsi Kontribusi Nilai Tambah Sektor Basis Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara Periode 2011-2015

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Proporsi Kontribusi Nilai Tambah Rupiah (%)					
		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		Konstruksi		Transportasi dan Komunikasi	
2011	54,910.88	12,154.18	22.13%	6,947.71	12.65%	6,746.22	12.29%
2012	58,677.57	12,918.08	22.02%	7,324.26	12.48%	7,236.35	12.33%
2013	62,442.50	13,765.29	22.04%	7,933.96	12.71%	7,758.23	12.42%
2014	66,359.42	14,243.12	21.46%	8,396.76	12.65%	8,534.46	12.86%
2015	70,418.85	14,663.34	20.82%	9,193.45	13.06%	9,203.25	13.07%
Rata-rata/Tahun	62,561.84	13,548.80	21.70%	7,959.23	12.71%	7,895.70	12.59%

Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, diolah



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara, 2016

Gambar 3. Laju Pertumbuhan Sektor Basis di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

Dari gambar 3 diatas, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan sektor basis pertanian, kehutanan dan perikanan selama periode tahun 2011-2015 dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, walaupun di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 6,56% dari tahun 2012 sebesar 6,29%. Lain hal dengan sektor konstruksi di tahun 2015 tumbuh sebesar 9,49% dan transportasi dan komunikasi sebesar 7,25% di tahun 2015 yang cenderung turun naik.

Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sulawesi Utara

Sektor basis memberikan peran yang besar dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara. Dengan mengetahui daya serap sektor basis terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara dapat diketahui seberapa besar peranan sektor basis dalam penyerapan tenaga kerja.

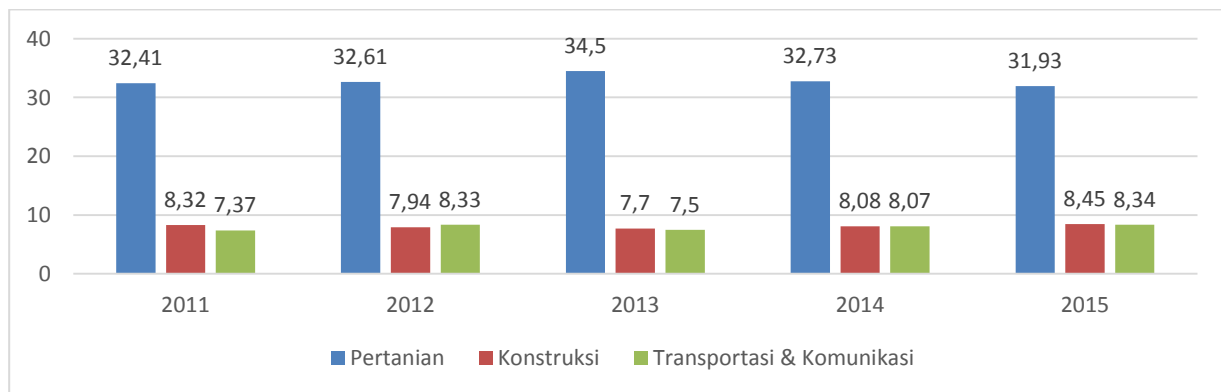
Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa daya serap sektor basis terhadap jumlah penduduk yang bekerja

di Provinsi Sulawesi Utara dari kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif. Daya serap terendah sektor basis pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 312.137 jiwa yaitu pada tahun 2012 sedangkan daya serap tertinggi tercatat 333.103 jiwa di tahun 2013 dengan daya serap rata-rata sebesar 321.332 jiwa per tahunnya. Daya serap terendah sektor basis konstruksi terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 84.546 jiwa yaitu pada tahun 2015 sedangkan daya serap terendah tercatat 74.315 jiwa di tahun 2013 dengan daya serap rata-rata sebesar 79.312 jiwa per tahunnya. Daya serap terendah sektor basis transportasi dan komunikasi terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 83.400 jiwa yaitu pada tahun 2015 sedangkan daya serap terendah tercatat 72.451 jiwa pada tahun 2013 dengan daya serap rata-rata sebesar 77.546 jiwa per tahunnya.

Tabel 7. Daya Serap Sektor Basis Terhadap Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015 (jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk Yang Bekerja (jiwa)	Jumlah Penduduk Yang Bekerja Pada Sektor (jiwa)		
		Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Konstruksi	Transportasi dan Komunikasi
2011	990.720	321.121	82.431	73.065
2012	957.292	312.137	76.026	79.698
2013	965.457	333.103	74.315	72.451
2014	980.756	320.963	79.244	79.114
2015	1.000.032	319.336	84.546	83.400
Rata ² pertahun	978.851	321.332	79.312	77.546

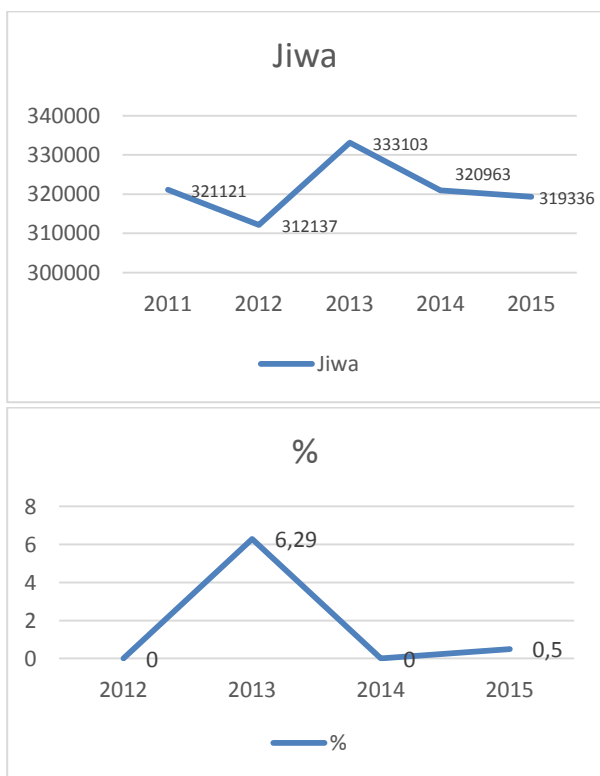
Sumber: Data BPS Provinsi Sulawesi Utara 2016, diolah



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016 yang diolah

Gambar 4. Proporsi Daya Serap Sektor Basis Terhadap Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015 (%)

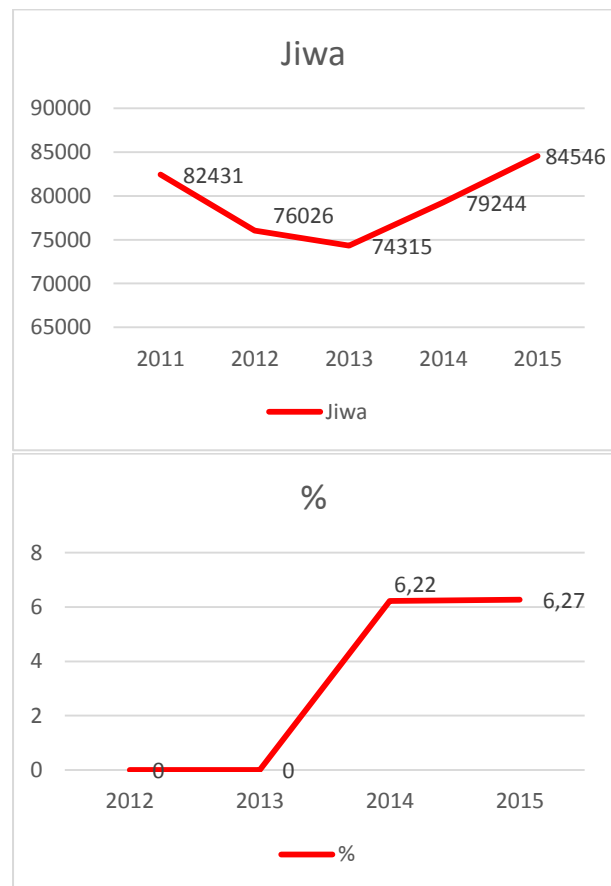
Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa proporsi daya serap sektor basis terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara dari kurun waktu tahun 2011-2015 cenderung fluktuatif. Proporsi daya serap terendah sektor basis pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 31,84% yaitu pada tahun 2015 sedangkan proporsi daya serap tertinggi tercatat 34,50% pada tahun 2013 dengan proporsi daya serap rata-rata sebesar 32,84% per tahunnya. Proporsi daya serap terendah untuk sektor konstruksi terhadap jumlah penduduk yang bekerja tercatat 7,70% yaitu pada tahun 2013 sedangkan proporsi daya serap tertinggi tercatat 8,45% pada tahun 2015 dengan proporsi daya serap rata-rata sebesar 8,10% per tahunnya. Proporsi daya serap terendah untuk sektor transportasi dan komunikasi tercatat sebesar 7,37% yaitu pada tahun 2011 sedangkan proporsi daya serap tertinggi tercatat 8,34% pada tahun 2015 dengan proporsi daya serta rata-rata sebesar 7,92%. Perubahan tenaga kerja yang bekerja di sektor basis juga berpengaruh pada laju pertumbuhan tenaga kerja itu sendiri.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, diolah
Gambar 5. Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Basis Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

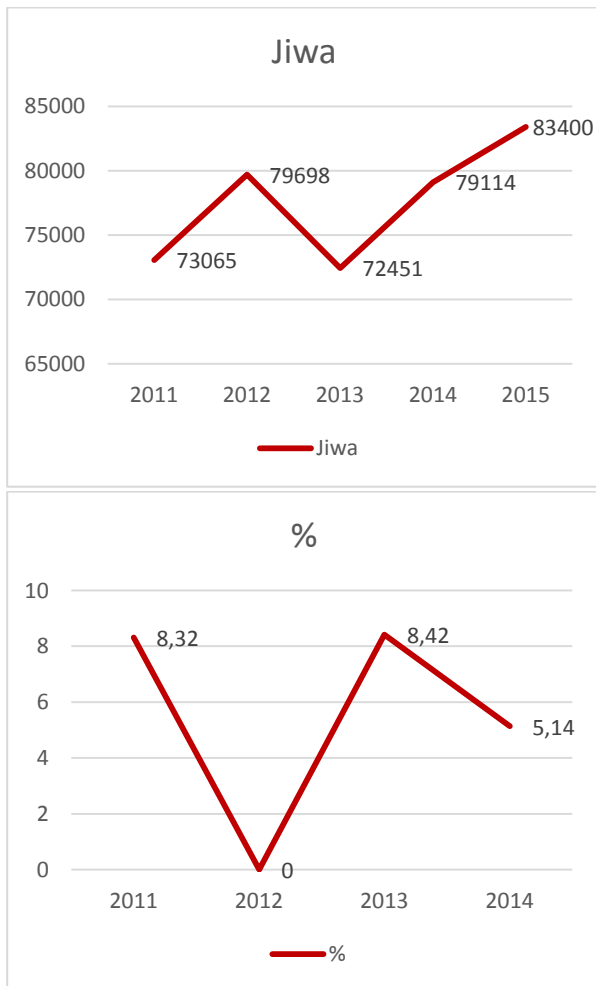
Dari Gambar 5, dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian selama periode tahun 2011-2015 cenderung negatif walaupun pada periode tahun 2012-2013 meningkat positif sebesar 6,29%. Pertumbuhan tenaga kerja terendah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terjadi pada periode 2013-2014 yaitu sebesar -3,78%, sedangkan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012-2013 sebesar 6,29% dengan rata-rata pertumbuhan 0,22 per tahunnya.

Gambar 6 dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan tenaga kerja sektor basis konstruksi, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan selama periode tahun 2011-2015. Pertumbuhan tenaga kerja terendah sektor konstruksi terjadi pada periode tahun 2011-2012 yaitu sebesar -8,42%, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 6,27% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 0,44%.



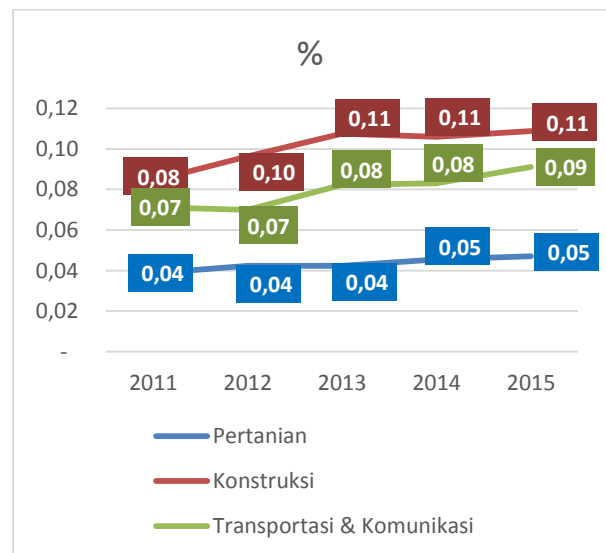
Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, Diolah
Gambar 6. Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

Gambar 7 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa laju pertumbuhan tenaga kerja sektor basis transportasi dan komunikasi, mengalami fluktuatif selama periode tahun 2011-2015. Pertumbuhan tenaga kerja terendah sektor transportasi dan komunikasi terjadi pada periode tahun 2012-2013 yaitu sebesar -10,00%, sedangkan pertumbuhan tenaga kerja tertinggi terjadi pada tahun periode 2013-2014 yaitu sebesar 8,42% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 2,97%. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh laju pertumbuhan sektor basis terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja di sektor basis digunakan analisis elastisitas. Dengan melihat tingkat elastisitas kesempatan kerja pada sektor basis, akan dapat dilihat tingkat produktivitas kerja secara sektoral.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, diolah
Gambar 7. Laju Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Transportasi dan Komunikasi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

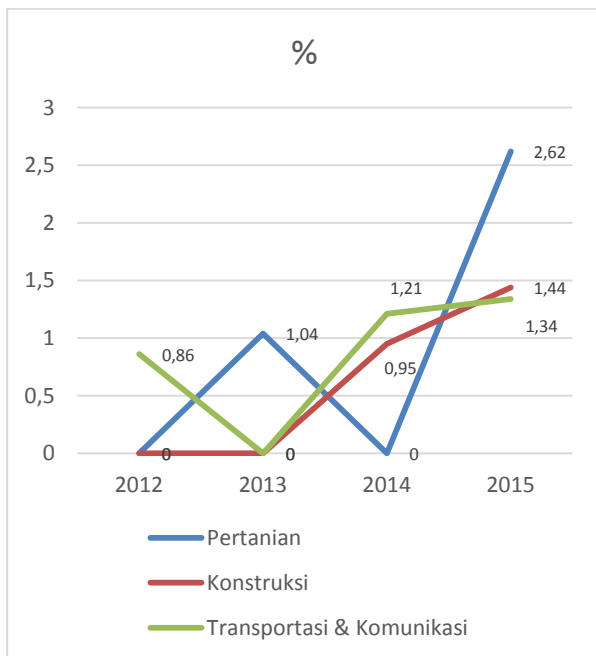
Gambar 8 menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pada sektor basis periode tahun 2011-2015 menghasilkan produktivitas yang meningkat. Pada sektor pertanian, kehutanan dan pertanian selama periode tahun 2014-2015 mengalami peningkatan cukup pelan yang hanya naik sebesar 0.05% dari tahun 2011-2013 sebesar 0.04%. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan produktivitas cukup baik pada periode tahun 2012 sekitar 0.10% naik menjadi sebesar 0.11% pada tahun 2013-2015. Sedangkan pada sektor transportasi dan komunikasi pada periode tahun 2013-2014 mengalami peningkatan yang cukup baik hingga pada tahun 2015 sebesar 0.09%.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, Diolah
Gambar 8. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Basis Periode Tahun 2011-2015 di Provinsi Sulawesi Utara

Gambar 9 dapat diketahui bahwa elastisitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan periode tahun 2011-2015 masih cenderung fluktuatif dimana pada tahun 2012 dan 2014 inelastisitas, sedangkan pada tahun 2013 dan 2015 bersifat elastisitas. Pada sektor konstruksi penyerapan tenaga kerja pada periode 2011-2015 mengalami inelastisitas di tahun 2012-2014 sedangkan pada tahun 2015 mengalami kenaikan positif dan bersifat elastisitas. Pada sektor transportasi dan komunikasi pada periode tahun 2011-2015 juga mengalami kenaikan positif, terlihat pada tahun 2012-2013 mengalami

inelastisitas, sedangkan pada tahun 2014-2015 mengalami pertumbuhan baik dan bersifat elastisitas. Ini berarti bahwa dengan adanya kenaikan produksi sebesar 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan naik sebesar lebih dari 1%. Sedangkan sektor transportasi dan komunikasi masih cenderung mengalami perlambatan selama periode tahun 2011-2015 yang bersifat unitary elastis, berarti bahwa dengan adanya kenaikan produksi sebesar 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan naik sebesar 1%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Utara, dengan kata lain semakin tinggi produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan.



Sumber: Data BPS Sulawesi Utara 2016, Diolah
Gambar 9. Laju Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Basis Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011-2015

Pembahasan

Sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara memiliki arti penting bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dikarenakan peranan sektor basis dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan juga penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis data menunjukkan sektor-sektor yang menjadi sektor basis berdasarkan hasil perhitungan LQ tahun

2011-2015 di Provinsi Sulawesi Utara terdapat tiga sektor basis.

Sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2011-2015 adalah sektor Pertanian, Konstruksi, Transportasi dan Komunikasi. Menurut Arsyad (2010) terjadinya arus pendapatan dari luar daerah ini akan menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan kesempatan kerja yang baru.

Sektor transportasi dan komunikasi yang merupakan sektor basis pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai LQ tahun 2011-2015 masing-masing 1,57%, 1,58%, 1,60%, 1,56% dan 1,52% terus mengalami pertumbuhan yang fluktuatif atau relatif stabil. Sektor Konstruksi memiliki nilai LQ tahun 2011-2015 masing-masing 1,32%, 1,30%, 1,31%, 1,28%, 1,29% terus mengalami pertumbuhan yang relatif stabil. Lain halnya dengan sektor transportasi dan komunikasi yang memiliki nilai LQ tertinggi tahun 2011-2015 masing-masing sebesar 1,88%, 1,84%, 1,80%, 1,82%, dan 1,78% akan tetapi terus mengalami penurunan. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa investasi pemerintah yang umumnya merupakan pembangunan dan pemeliharaan prasarana publik yang bersifat *non excludable* dan atau *non rivalry* relatif tertinggal, yang kemudian ditambah dengan tingkat investasi swasta masih rendah.

Hasil analisis proporsi terhadap PDRB menunjukkan bahwa kontribusi sektor basis di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kecenderungan menguat adalah sektor pertanian, konstruksi, dan sektor transportasi dan komunikasi. Nilai proporsi sektor basis terhadap PDRB terbesar adalah sektor pertanian dengan nilai rata-rata proporsi selama periode tahun 2011-2015 sebesar 25,27% per tahun. Hal ini menunjukkan peranan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto terbesar dari sektor-sektor yang lain dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan nilai proporsi sektor konstruksi terhadap PDRB selama periode tahun 2011-2015 dengan nilai rata-rata proporsi sebesar 12,71% per tahun. Sedangkan nilai proporsi sektor transportasi dan komunikasi terhadap PDRB selama periode tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata proporsi sebesar 9,69% per tahunnya.

Penyerapan sektor basis terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dilihat melalui elastisitas kesempatan kerja dalam kaitannya

dengan kemampuan sektor basis dalam menyerap tenaga kerja. Hasil dari perhitungan elastisitas, sektor pertanian menunjukkan selama periode tahun 2011-2015 memiliki kemampuan menyerap tenaga kerjanya bersifat elastis kecuali pada periode tahun 2011-2012 dan 2013-2014 yang bersifat inelastis. Hal ini berarti bahwa dengan adanya kenaikan nilai produksi sebesar 1% maka jumlah tenaga kerja yang dapat diserap akan naik lebih dari 1%. Pada sektor konstruksi selama periode 2011-2015 kemampuan menyerap tenaga kerjanya bersifat elastis kecuali pada periode 2011-2012 dan 2012-2013. Sedangkan sektor transportasi dan komunikasi selama periode 2011-2015 kemampuan penyerapan tenaga kerjanya bersifat unitary elastis kecuali pada periode tahun 2012-2013. Terjadinya penyerapan tenaga kerja di sektor basis ini dikarenakan semakin tinggi daya saing angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi pertumbuhan secara berkelanjutan.

Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja pada sektor basis periode tahun 2011-2015 menghasilkan produktivitas yang meningkat. Pada sektor pertanian, kehutanan dan pertanian selama periode tahun 2011-2015 mengalami peningkatan cukup pelan yang hanya naik sebesar 0.05% dari tahun 2011-2013 sebesar 0.04%. Sektor Konstruksi mengalami pertumbuhan produktivitas cukup baik pada periode tahun 2012 sekitar 0.10% naik menjadi sebesar 0.11% pada tahun 2013-2015. Sedangkan pada sektor transportasi dan komunikasi pada periode tahun 2013-2014 sebesar 0.08%, mengalami peningkatan yang cukup baik hingga pada tahun 2015 sebesar 0.09%.

Tarigan (2005) menyatakan bahwa alasan perlunya pengembangan sektor basis tersebut karena pembangunan sektor basis merupakan salah satu jalur kegiatan dalam upaya yang menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dalam artian tingkat hidup yang lebih maju dan bermutu. Selain itu pengembangan sektor basis mampu menciptakan keterkaitan yang sempurna dengan sektor-sektor non basis dalam arti memacu pengembangan sektor non basis dalam hal bertambahnya permintaan maupun meluasnya lapangan kerja baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Sektor Basis di Provinsi Sulawesi Utara adalah Sektor Pertanian, Sektor Konstruksi dan Sektor Transportasi dan Komunikasi.
2. Penyerapan tenaga kerja di tiap-tiap sektor basis berperan penting terhadap peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB). Pada sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dari sektor basis lainnya, akan tetapi laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan. Berbeda dengan sektor transportasi dan komunikasi yang penyerapan tenaga kerjanya lebih kecil, namun laju pertumbuhan produktivitas tenaga kerjanya lebih besar, yang kemudian diikuti oleh sektor konstruksi.

Saran

1. Menjaga kinerja sektor basis yang meliputi sektor pertanian, sektor konstruksi, sektor transportasi dan komunikasi agar tetap mampu memenuhi kebutuhan daerah sendiri maupun mengekspor ke daerah lain sehingga tetap memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB.
2. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara berupaya keras untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan cara menumbuhkan industri baru dan mengembangkan sektor-sektor industri kecil, sebab sektor ini juga mampu menyerap banyak tenaga kerja

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharja. 2008. *Pembangunan Wilayah Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arief. G.I. 2009, *Identifikasi Dan Peran Sektor Unggulan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Dki Jakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN*. Yogyakarta.

- 2010. Ekonomi Pembangunan, Edisi 5. Yogyakarta: UPP. STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara 2011-2015. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan Utama.
- Dedifu. M.P. (2015), “Analisis Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Studi Kasus di Kota Manado”,*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 15, No. 03, Tahun 2015.
- Ghalib, R. 2005. *Ekonomi Regional*. Pustaka Ramadhan. Bandung.
- Indrianti F. S 2014, *Peranan Sektor Basis Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya
- Jhingan, 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta : Rajawali. Press
- Khanifah. S. 2012, *Analisis Pergeseran Struktur Perekonomian Dan Penentuan Sektor Unggulan Atas Dasar Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Magelang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mulyadi Subri. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sanjaya, 2009, *Analisis Terhadap Peranan Sektor Pertanian Di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Savitri D. (2008), *Analisis Identifikasi Sektor Unggulan Dan Struktur Ekonomi Pulau Sumatra*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
- Simanjuntak,P,1985. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*.LPFEUI. Jakarta.
- Sukirno. S. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Syaiful. 2011, *Analisis Sektor Basis Dalam Hubungannya Dengan Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Batang Hari*. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 2 No. 1, Juli-September 2014*. Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
- Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- 2010. *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tindaon, O. 2011.*Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik)*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Tambunan, T. 2003. *Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia, Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Widodo, T., 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan